

PENGARUH BELANJA MODAL, UKURAN PEMERINTAH, JUMLAH SKPD DAN OPINI AUDIT TERHADAP PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH NUSA TENGGARA

Praptiningsih^{1)*}, Jihan Khoirunnisa²⁾

¹ Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
email: praptiningsih@upnvj.ac.id

² Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

ABSTRACT

This research is a quantitative study which aims to examine the effect of capital expenditure as measured by total expenditure transformed into Ln capital expenditure, Government size measured by total assets transformed into Ln total assets and number of SKPD, and audit opinion measured by grading opinion obtained by regencies / cities in Nusa Tenggara. The population in this study were all districts / cities in Nusa Tenggara for the period 2016-2018, the sample in this study used the census method. Testing the hypothesis in this study using Multiple Regression Analysis with the SPSS program. The results of hypothesis testing show that (1) capital expenditure has a significant effect on the disclosure of local government financial statements (2) the size of government on assets does not have a significant effect on disclosure of local government financial statements (3) the size of government on the number of SKPD does not have a significant effect on disclosure of government financial statements (4) audit opinion has a significant effect on the disclosure of local government financial statements.

Keywords: capital expenditure. government measures; audit opinion, disclosure

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk menguji pengaruh belanja modal yang diukur dengan total belanja yang ditransformasikan ke Ln belanja modal, Ukuran Pemerintah yang diukur dengan total aset yang ditransformasikan ke Ln total aset dan Jumlah SKPD, dan opini audit yang diukur dengan memberi tingkatan pada opini yang diperoleh Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara periode 2016-2018, sampel dalam penelitian ini menggunakan metode sensus. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan Analisis Regresi Berganda dengan program SPSS. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa (1) belanja modal berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah (2) ukuran pemerintah pada aset tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah (3) ukuran pemerintah pada jumlah SKPD tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah (4) opini audit berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

Kata Kunci: belanja modal, ukuran pemerintah. opini audit; pengungkapan

1 PENDAHULUAN

Pemerintahan ideal dapat tercapai dengan transparansi publik serta keterbukaan informasi menjadi hal krusial yang menuntut tata pengelolaan pemerintahan yang baik atau *good governance*. Tanggung jawab pemerintah dalam mengatur segala permasalahan sosial yang ada, seperti wewenang tanggung jawab administrasi, wewenang ekonomi, hingga wewenang politik. *Good governance* dapat diartikan sebagai indeks penilaian tata kelola pemerintah yang baik yang dapat dilihat dari melakukan pengawasan, memberikan kritik, evaluasi, maupun saran dalam menanggapi informasi yang ada serta usaha masyarakat mendapatkan informasi relevan terhadap kinerja pemerintah. Pemerintah mampu melaksanakan otonomi daerah sangat berkaitan dengan *Good governance*. UU No. 23/2014 tentang pemerintah daerah berisi tentang kepentingan masyarakat yang kewenangannya diatur oleh otonomi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan otonomi dan terwujudnya *Good governance*, pemerintah otonom bertanggung jawab pada pengaturan keuangan daerah. Pemerintah harus terbuka kepada publik serta menyiapkan semua informasi keuangan yang sesuai secara jujur. Penyusunan serta penyajiannya harus memperhatikan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang merupakan dasar-dasar dalam bidang akuntansi yang umum digunakan oleh pemerintah dalam penyusunan dan penyajian laporan finansial beserta lampiran pengungkapan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71/2010. Peraturan tersebut secara penuh menggunakan basis akrual untuk penyajian hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), baik untuk hal pengakuan aset, ataupun pengakuan pendapatan beban, ekuitas, dan kewajiban.

BPK memberikan opini kepada empat kabupaten dengan opini (WTP),

yakni Kabupaten Ngada, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Manggarai Timur, dan Kabupaten Manggarai Barat. Sedangkan Kabupaten Sumba Barat, Kupang, TTS, TTU, Alor, Flores Timur, Ende, Rote Ndao, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Nagekeo, Sabu Raijua, dan Malaka masih memperoleh opini wajar dengan pengecualian (WDP). Terkhusus pada kabupaten Flores Timur yang sudah terhitung sejak tahun 2007 mendapatkan opini WDP pada laporan keuangannya. Karena dengan hal yang dikecualikan seperti, Kabupaten Flores Timur belum optimal dalam mengelola aset tetap yaitu terdapat perbedaan nilai aset tetap antara neraca, tanah atas ruas jalan dan bangunan belum disajikan, aset tetap belum diberi nomor inventaris dan KIB belum memberikan informasi aset tetap secara lengkap dan akurat. (kupang.bpk.go.id).

Adanya permasalahan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Kabupaten/Kota Nusa Tenggara Timur masih belum seluruhnya melakukan *disclosure* informasi secara penuh, dilihat dari opini yang didapatkan masih banyak yang mendapatkan opini WDP. Kasus tersebut menjelaskan penungkapan laporan tersebut di daerah ini tidak dilakukan secara penuh. Sedangkan pada standar akuntansi pemerintah menjelaskan bahwa harus dilakukan *disclosure* secara penuh dalam laporan keuangan, agar bisa dipergunakan para pembuat keputusan.

Berdasarkan dari uraian diatas maka penelitian yang akan dilakukan memiliki perumusan masalah yaitu apakah belanja modal, ukuran pemerintah, jumlah SKPD dan opini audit berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah Nusa Tenggara. Tujuan dari penelitian ini untuk menguji belanja modal, ukuran pemerintah, jumlah SKPD dan opini audit berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah Nusa Tenggara. Penelitian ini mengabungkan variabel dari beberapa peneliti sebelumnya, sampel yang

digunakan dalam penelitian ini berbeda dengan acuan dasar dalam penelitian sebelumnya yaitu laporan keuangan pemda kabupaten/kota Nusa Tenggara. serta periode dalam penelitian ini dikembangkan sampai dengan periode 2016-2018.

2 KAJIAN LITERATUR

Mahmudi (2019) mendefinisikan disclosure sebagai salah satu prinsip standar akuntansi pemerintah, dimana pada Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) harus menggambarkan laporan yang komprehensif. Sistem pemerintahan Indonesia, *disclosure* disusun secara terintegrasi dan detail dalam LKPD yang berisikan informasi utuh yang diperlukan para pengguna LKPD. Disclosure terdiri atas disclosure yang bersifat sukarela (*voluntary disclosure*) dan disclosure yang bersifat wajib (*mandatory disclosure*). Tetapi *mandatory disclosure* adalah minimal *disclosure* yang memenuhi standar yang telah ditentukan guna mencapai transparansi dan akuntabilitas LKPD. Pengungkapan informasi secara penuh dalam LKPD sangat penting untuk menghindari asimetris informasi atau kesalahpahaman informasi yang disajikan. Sehingga dapat memperjelas LKPD dalam penyajian mengikuti peraturan yang berlaku dan dapat mempermudah si pemakai untuk mengerti laporan yang disampaikan.

Belanja modal dapat didefinisikan sebagai realisasi anggaran pemerintah daerah guna meningkatkan kekayaan atau aset daerah untuk periode manfaatnya melebihi satu tahun anggaran. Pengeluaran atau penggunaan dana yang dilakukan diharapkan dapat meningkatkan layanan bagi penduduknya. Jumlah pengeluaran anggaran yang makin besar akan mendorong pelayanan masyarakat yang diberikan pemerintah daerah menjadi lebih baik. Jika belanja modal lebih besar dan digunakan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat diharapkan pemerintah daerah

melakukan pengungkapan informasi dalam LKPD.

Ukuran sebuah entitas merupakan skala dengan yang mana sebuah entitas bisa dikategorikan menurut besar kecilnya dengan memperhatikan berbagai tolok ukur. Ukuran sebuah daerah apakah kecil atau besar dapat ditilik dari seberapa banyak sebuah entitas tersebut mempunyai keseluruhan aset. Dalam hal ini, aset adalah standar minimum komponen utama pada penyajian LKPD pada bagian neraca. pemerintah daerah yang mempunyai jumlah aset banyak akan semakin kompleks dalam pengelolaannya dibanding pada pemerintah otonom dengan jumlah aset sedikit. Aset pemerintah daerah yang banyak akan menjadikan pengelolaannya jauh lebih kompleks, demikian juga sebaliknya. Selain itu, ukuran yang lebih besar dalam pemerintah daerah akan memungkinkan SKPD di suatu daerah akan bertambah pula, maka SKPD-nya akan makin banyak dan membuat semakin rumitnya dalam menjalankan aktivitas sesuai dengan fungsinya, serta informasi yang diungkapkan akan semakin besar sehingga masyarakat dapat mengetahui pencapaian dari Pemerintah daerah.

Baik atau buruknya LKPD tidak bisa lepas dari peran yang diberikan oleh auditor. Di Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan berperan sebagai auditor eksternal yang memeriksa seluruh LKPD yang telah dibuat di tingkat daerah. BPK akan menyampaikan hasil akhir dari pemeriksaan berupa opini audit yang merupakan satu dari sekian banyak indikator dimana LKPD di suatu pemerintah daerah itu berkualitas. Kriteria lain yang disusun BPK untuk menentukan kualitas LKPD mencakup kepatuhan disclosure, kepatuhan pada peraturan dan SAP, dan pengendalian internal yang efektif.

Andriani, *et al* (2019) telah meneliti variabel belanja modal atas *disclosure* LKPD dimana belanja modal tidak mempengaruhi *disclosure* laporan

keuangannya. Dijelaskan bahwa tingginya belanja modal di suatu daerah belum menjamin tingginya disclosure informasi yang termuat di laporan keuangan. Berbeda dengan itu, Hendriyani, et al. (2015), Soleman, et al. (2019), dan Amaliah & Haryanto (2019) menyebutkan bahwa belanja modal mempengaruhi pengungkapan laporan keuangan di masing-masing pemerintah otonom. Dengan kata lain, besarnya belanja modal yang dilakukan pemerintah daerah dapat menambah dorongan pemerintahan daerah otonom dalam membuat Laporan Keuangan untuk melakukan *disclosure* secara penuh.

Selanjutnya, Budiarto & Indarti (2019) dan Andriani et al. (2019) menguji dampak dari total aset daerah tidak mempengaruhi *disclosure* pada laporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, besarnya total aset belum menjamin tingginya disclosure. Penelitian keduanya tidak sejalan dengan Merliani, et al. (2018), dan Simbolon & Kurniawan (2015) yang menegaskan bahwa total aset di daerah mempengaruhi *disclosure* laporan keuangannya. Hasil tersebut menegaskan bahwa total aset yang besar mengharuskan keterbukaan dalam mengatur keuangannya demi tercapainya akuntabilitas. Sedangkan Andriani, et al. (2019) dan Merliani, et al. (2018), menyebutkan jumlah SKPD tidak mempengaruhi pengungkapan laporan keuangan daerah. Artinya semakin banyak jumlah SKPD akan semakin rumit dalam berkoordinasi ataupun proses kooperasi. Ramdhani (2016) dan Lutfia, et al. (2018) menunjukkan hasil yang berbeda di mana jumlah SKPD mempengaruhi *disclosure* LKPD.

Budiarto & Indarti (2019) dan Najah & Purwati (2019) menguji adanya pengaruh hasil audit kepada laporan keuangan otonom dan hasilnya terlihat bahwa opini audit tidak mempengaruhi disclosure laporan keuangan. Sehingga, pemerintah daerah akan merasa puas dan cukup ketika

mereka mendapatkan opini laporan keuangan yang baik. Namun hasil penelitian di atas berbanding terbalik dengan penelitian Naopal, et al. (2017), Ayu (2017), dan Nor, et al. (2019) menunjukkan bahwa hasil audit mempengaruhi pengungkapan laporan tersebut, yang artinya apabila tingkat kebaikan meningkat pada opini yang di dapatkan Pemda, maka tingkat kebaikan pada pemerintah meningkat juga untuk mendorong melakukan disclosure terhadap laporan keuangan.

3 METODE PENELITIAN

Populasi studi ini mencakup laporan keuangan dari Pemkab/Pemkot di Nusa Tenggara tahun 2016-2018. Nusa Tenggara terdiri dari 32 kabupaten/kotamadya di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. LKPD tahun 2016-2018, periode waktu ini terpilih dikarenakan laporan tahun 2016 adalah implementasi dari Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), oleh karena hal ini diharapkan ke depan pemerintah daerah dapat mengerti dan melaksanakan serta mengimplementasikan penyusunan laporan keuangan yang mengimplementasikan SAP. Metode sensus digunakan sebagai teknik pengambilan sampel di studi ini. Sugiyono (2017) mengartikan metode sensus adalah metode untuk menentukan sampel jika seluruh populasi dijadikan sampel, untuk penelitian yang hasil akhirnya diharapkan terbuat generalisasi dengan kesalahan yang minim. Maka, sampel penelitian ini mencakup 96 laporan keuangan kabupaten/kotamadya di Nusa Tenggara.

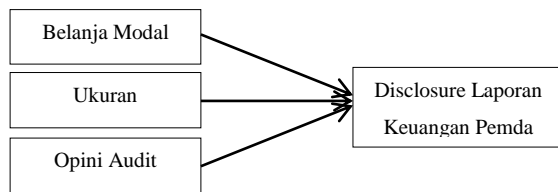
Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linear berganda. Dalam hal ini, analisis dilakukan guna melihat cara pemerintah daerah melakukan pengungkapan laporan keuangannya yang bisa mempengaruhi variabel yang akan diteliti yaitu belanja modal, ukuran pemerintah, jumlah SKPD dan opini audit. Analisis regresi ini mempunyai persamaan yakni:

$$DSC = \alpha + \beta_1 BM + \beta_2 AS + \beta_3 SKPD + \beta_4 OA + \varepsilon$$

Dimana DSC adalah Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, BM adalah Belanja Modal, AS adalah LN Total Aset, SKPD Jumlah SKPD, OA adalah Opini Audit, β_0 adalah bilangan konstanta, β_{1-4} adalah Koefisien regresi dan ε adalah *error*.

4 HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh belanja modal, ukuran pemerintah, dan opini audit oleh pemerintah daerah yang melakukan *disclosure* laporan keeuangan. Telah disusun kerangka pikir guna memperlancar diselesaikannya permasalahan pada hal yang diteliti ini, didasari oleh penjelasan diatas. Berikut adalah bentuk kerangka model penelitian:



Gambar 1. Kerangka Model Penelitian

Hasil analisis deskriptif di setiap variabel penelitian diperoleh dengan memanfaatkan program SPSS 25 for windows.

Tabel 1. Hasil Statistik Deskriptif

	Statistik Deskriptif				
	N	Min	Maks	Rerata	SD
Belanja modal	84	25.27	28.24	26.16	.38
Aset	84	27.19	28.82	28.07	.33
SKPD	84	29	312	65.93	35
Opini audit	84	3	5	3.81	.98
Pengungkapan LKPD	84	.72	.86	.79	.04
Valid N (listwise)	84				

Sumber: Hasil SPSS

Tabel 1 menunjukkan analisis deskriptif pada masing-masing variabel penelitian dapat dijelaskan bahwa Kabupaten Sumba barat memiliki pengungkapan LKPD terendah, Kabupaten Belu, Kabupaten Lembata, Kabupaten Timor Tengah Utara,

Kabupaten Bima menunjukkan pengungkapan laporan keuangan yang tertinggi dengan nilai 0,86 atau 86%.

Uji normalitas memakai uji statistik Kolmogorof-Smirnov mempertimbangkan hasil dari nilai residual yang tidak terstandarisasi. Tabel berikut memperlihatkan hasil estimasi uji normalitas sudah terpenuhi.

Tabel 2. Hasil Uji Statistik Kolmogrov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		84
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.03790390
	Absolute	.067
Most Extreme Differences	Positive	.065
	Negative	-.067
Test Statistic		.067
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.
d. This is a lower bound of the true significance.

Uji multikolonieritas melihat keberadaan hubungan antar variabel bebas di model regresi. Uji multikolonieritas dalam studi ini memakai Variance Inflation Factors (VIF) dan tolerance. Hasil memperlihatkan nilai VIF setiap variabel bebas >10. Nilai tolerance setiap variabel bebas memperlihatkan seluruhnya bernilai >0,1. Maka, tidak ada hubungan multikolinieritas pada variabel bebas di model regresi tersebut.

Tabel 3. Hasil Uji Multikolonieritas

Coefficients ^a			
		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(constant)		
	belanja modal	.680	1.470
	aset	.551	1.813
	SKPD	.927	1.079
	opini audit	.679	1.473

a. Dependent Variable: pengungkapan LKPD

Untuk memperkuat hasil uji tersebut, maka dilakukan pengujian heteroskedastisitas menggunakan uji glejser. Tabel 4 memperlihatkan nilai sig pada variabel belanja modal 0,341, aset 0,479, jumlah SKPD 0,757, dan opini audit 0,638 yang melebihi nilai α 0,05. Dengan demikian, tidak terjadi heterokedastisitas di model regresi sehingga model regresi ini pantas digunakan dalam analisa selanjutnya.

Tabel 4. Hasil Uji Glejser

Koefisien ^a			
Model	t	Sig.	
(Constant)	-1.448	.152	
1			
belanja modal	.958	.341	
aset	.712	.479	
SKPD	-.310	.757	
opini audit	.473	.638	

a. Variabel Terikat: pengungkapan LKPD

Uji ini melihat adanya hubungan antara kesalahan penganggu di 1 periode terhadap kesalahan penganggu di periode yang lebih awal di model regresi. Untuk menguji autokorelasi, uji Durbin Watson (D-W) umum dilakukan. Hasil analisis memakai program SPSS 25 ditunjukkan di Tabel 4:

Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b		
Model	D-W	
1	.828	

a. Predictors: Opini audit, belanja modal, SKPD, aset

b. Variabel Terikat: Pengungkapan LKPD

Tabel 4 memperlihatkan nilai DW = 0,828 yang berada di -2 hingga +2. Sehingga, tidak terdapat autokorelasi dalam model ini.

Analisis ini mengetes pengaruh dari 2 variabel bebas atau lebih terhadap 1 variabel terikat. Hasil analisis memakai program SPSS 25 terlihat di tabel berikut:

Tabel 6. Hasil Model Regresi

Coefficients ^a		
Model	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients
1		
(Constant)		
belanja modal		
aset		
SKPD		

	B	Std. Error	Beta
(Constant)	2.465	.427	
1			
belanja modal	-.031	.013	-.285
Aset	-.032	.017	-.260
SKPD	-.034	.000	-.028
opini audit	.011	.005	.258

a. Dependent Variable: pengungkapan LKPD

Tabel 4 memperlihatkan nilai koefisien regresi dan konstanta untuk bisa dibuat menjadi persamaan regresi linear di bawah ini:

$$DSC = 2,465 - 0,031 BM - 0,032 AS - 0,034 SKPD + 0,011 OA$$

Uji ini melihat sejauh mana variabilitas variabel bebas mampu memperjelas variabilitas variabel terikat nilai koefisien determinasi adalah 0,137 yang memperlihatkan belanja modal, aset, SKPD, dan opini audit mempengaruhi sebesar 13,7% terhadap pengungkapan LKPD. Sedangkan sisanya 86,3% merupakan pengaruh dari faktor lain di luar penelitian ini.

Tabel 7. Hasil Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.423 ^a	.179	.137	.03885

a. Predictors: (Constant), Opini audit, belanja moda, SKPD, aset

Uji t melihat apakah koefisien variabel belanja modal, aset, SKPD, dan opini audit menunjukkan korelasi signifikan terhadap variabel pengungkapan LKPD. Hasil uji parsialnya sebagai berikut:

Tabel 8. Hasil Uji t

Coefficients ^a			
Model	t	Sig.	
1			
(Constant)	5.771	.000	
belanja modal	-2.303	.024	
aset	-1.891	.062	
SKPD	-.269	.789	

Berdasarkan tabel di atas secara parsial, variabel belanja modal dan opini audit secara signifikan mempengaruhi pengungkapan LKPD, sedangkan secara parsial ukuran aset pemerintahan dan jumlah SKPD tidak signifikan mempengaruhi pengungkapan LKPD

Belanja modal secara signifikan mempengaruhi pengungkapan LKPD. Kabupaten Lombok Timur tahun 2016 menunjukkan bahwa belanja modal yang besar sering kali menjadi kendala dalam pengungkapan LKPD, karena belum seluruh belanja modal yang telah digunakan dan dicatat dengan baik. Hal ini sejalan dengan teori keagenan di mana belanja modal yang dimiliki pemerintah daerah menjadi salah satu faktor kinerja keuangan dan dapat menimbulkan risiko penyalahgunaan yang tidak kecil, sehingga pemerintah merasa kesulitan untuk mengungkap informasi dalam laporan keuangannya agar terlihat baik pada prinsipil yang nantinya tidak akan menurunkan kepercayaan kepada pemerintah daerah. Hasil ini didukung oleh Soleman, et al. (2019) dan Amaliah & Haryanto (2019) yang menyatakan bahwasanya belanja modal mempengaruhi pengungkapan LKPD. Namun, hasil ini berbanding terbalik dengan Andriani, et al. (2019) yang menunjukkan bahwasanya belanja modal tidak mempengaruhi pengungkapan LKPD

Ukuran pemerintah pada aset tidak signifikan mempengaruhi pengungkapan LKPD. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin besar aset pemerintah daerah tidak menjamin tingginya pengungkapan. Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2018 menunjukkan nilai ln aset sebesar 28,82 dengan tingkat pengungkapan sebesar 76%, Kabupaten Malaka tahun 2016 memiliki nilai ln aset sebesar 27,19 dengan pengungkapan 80%. Hal ini dipengaruhi masih adanya pemerintah daerah yang belum sepenuhnya maksimal

melakukan pencatatan seluruh asetnya, seperti mengelola dan menata persediaan aset (kupang.bpk.go.id). Hasil ini sejalan dengan Budiarto & Indarti (2019) dan Andriani, et al. (2019) yang menunjukkan bahwa ukuran aset pemerintah tidak mempengaruhi pengungkapan LKPD.

Hasil uji regresi pada jumlah SKPD menunjukkan nilai t_{hitung} berada pada daerah penerimaan H_0 ($-0,269 < 1,990$) dengan nilai signifikansi senilai 0,05 ($0,0789 > 0,05$). Maka, jumlah SKPD tidak secara signifikan mempengaruhi pengungkapan LKPD. Semakin banyak SKPD yang dimiliki pemerintah daerah akan semakin kompleks dan sulit berkordinasi antara SKPD lainnya, sehingga besarnya potensi pencatatan yang kurang akurat. Oleh sebab itu jumlah SKPD tidak dapat menajmin adanya peningkatan dalam pengungkapan secara lengkap dalam laporan keuangan. Penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Marliani, et al. (2018) dan Andriani, et al. (2019) menyatakan bahwa jumlah SKPD tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. namun

Opini audit secara signifikan mempengaruhi pengungkapan LKPD. Hal ini menunjukkan opini audit secara signifikan positif mempengaruhi pengungkapan LKPD. Kotamadya Dompu pada tahun 2016-2018 dan Kab. Belu pada tahun 2018 memperoleh WTP dengan tingkat pengungkapan laporan keuangan tertinggi sebesar 86%. Hal ini berarti kedua pemerintah daerah tersebut menunjukkan pelaksanaan dan pelaporan yang baik serta menunjukkan kecenderungan yang tidak menutupi informasi. Hal tersebut sesuai dengan teori keagenan, dimana Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengeluarkan opini atas kewajaran LKPD. Oleh sebab itu, hal tersebut memunculkan tanggapan baik dari masyarakat untuk pemerintah daerah serta mendorong transparansi informasi bagi masyarakat. Hasil ini sesuai dengan Ayu

(2017), Naopal, *et al.* (2017), dan Nor, *et al.* (2019) yang menunjukkan bahwasanya opini audit mempengaruhi pengungkapan LKPD. Namun, hasil ini tidak sejalan dengan Najah & Purwati (2019) dan Budiarto & Indarti (2019) yang menunjukkan bahwasanya opini audit tidak memengaruhi pengungkapan LKPD.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah melakukan penelitian dan serangkaian pengujian hipotesis terkait, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut Variabel belanja modal, dan opini audit secara signifikan mempengaruhi pengungkapan LKPD, sedangkan ukuran aset pemerintahan dan jumlah SKPD tidak signifikan mempengaruhi pengungkapan LKPD.

Bagi Pemda Nusa Tenggara disarankan untuk meningkatkan pengungkapan LKPD untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat karena pemda telah melaksanakan kegiatan secara transparan dan akuntabel. Selain itu, dalam penelitian ini hanya menjelaskan sebagian kecil dari faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan akibat masih ada faktor-faktor lain yang dapat menjelaskan tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah yang tidak dimasukkan kedalam penelitian ini karena keterbatasan waktu dan data. Hanya melibatkan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Provinsi Nusa Tenggara Barat, sehingga belum mampu menggambarkan secara keseluruhan terkait tingkat pengungkapan LKPD.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih kepada kepada UPN Veteran Jakarta terutama Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang telah membantu dan mendukung penelitian, dan terimakasih atas bantuan BPS yang membantu melengkapi data penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Amaliah, E. F., & Haryanto. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2017. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(2), 1–13.
- Andriani, M., Santi, E., & Mustika, R. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten / Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2014-2016. *Akuntansi Dan Manajemen*, 14(1), 1–14. Retrieved from <http://ejournal.pnp.ac.id/index.php/JAM/article/view/157>
- Ayu, P. P. (2017). Analisis Faktor-Faktor Pengungkapan Laporan Keuangan Pemeirntah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Jawa Barat). *Ekspansi*, 9(2), 187–198.
- Budiarto, D. S., & Indarti, L. (2019). Apakah Karakteristik Pemerintah Daerah Berpengaruh Pada Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah? Riset pada Kabupaten di Jawa Tengah. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 12(1), 19–31. <https://doi.org/10.30813/jab.v12i1.1549>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25 (Edisi 9)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hendriyani, R., & Tahar, A. (2015). Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Di Indonesia. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE)*, 22(1), 25–33.
- Lutfia, F. I., Maryono, & Bagana, B. D. (2018). Determinan Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2014-2016)

- Ferina. *Dinamika Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan*, 7(1), 82–95.
<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* (edisi keen). Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Marliani, M., Amin, M., & Mawardi, M. C. (2018). Pengaruh Karakteristik Pemerintah, Kompleksitas, dan Temuan Audit terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *E-JRA*, 07(10).
- Najah, U., & Purwati, A. S. (2019). Analisis Pengaruh Karakteristik PEMDA , Indeks Pembangunan Pengungkapan LKPD. *Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah*, 5(1), 70–88.
- Naopal, F., Rahayu, S., & Yudowati, S. P. (2017). Pengaruh Karakteristik Daerah , Jumlah Penduduk , Temuan Audit, dan Opini Audit Terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Assets*, 7(1), 56–68.
- Nor, W., Hudaya, M., & Novriyandana, R. (2019). Financial Statements Disclosure on Indonesian Local Government Websites. *Asian Journal of Accounting Research*, 4(1), 112–128. <https://doi.org/10.1108/AJAR-06-2019-0043>
- Nosihana, A., & Yaya, R. (2016). Internet Financial Reporting dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya Pada Pemerintah Kota dan Kabupaten Di Indonesia. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 3(2), 89–104. <https://doi.org/10.24815/jdab.v3i2.5389>
- Ramdhani, D. (2016b). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Banten. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 9(2), 146–161. <https://doi.org/10.35448/jrat.v9i2.430>
- 1
- Simbolon, H. A. U., & Kurniawan, C. H. (2015). Pengaruh Karakteristik Pemerintah terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. *Accounting Analysis Journal*, 30(1), 54–70. <https://doi.org/https://doi.org/10.24002/modus.v30i1.1587>
- Soleman, M. T., Pontoh, W., & Budiarmo, N. S. (2019). Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Di Kabupaten Kepulauan Talaud). *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 14(1), 18–21. <https://doi.org/10.32400/gc.14.1.22249.2019>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2016). *Kupas Tuntas Penelitian Akuntansi dengan SPSS* (Mona, ed.). Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Suparno, & Nanda, R. (2016). Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah, Diferensiasi Fungsional Dan Spesialisasi Fungsional Terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 3(2), 105–118. <https://doi.org/10.24815/jdab.v3i2.5390>